



# RENCANA KERJA TAHUNAN 2022

## DP3AKB

(DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA)

## KABUPATEN LOMBOK TIMUR

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 telah selesai.

Rencana Kerja Tahunan ini mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 2018 – 2023 (Perubahan).

Rencana Kerja Tahunan ini menjadi pedoman dalam melaksanakan program program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2022 untuk mencapai kinerja yang telah ditargetkan guna mewujudkan cita cita Pemerintah Daerah dalam mewujudkan “*LOMBOK TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA DAN AMAN*” dengan Memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak serta meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olahraga.

Terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis ini.

Selong, Januari 2022.

Kepala

Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Lombok Timur



**H. Ahmat A. S.Kep. MM**

Nip. 19661231 198803 1 306

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	4
1.1. LATAR BELAKANG.....	4
1.2. LANDASAN HUKUM.....	4
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021 .....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra DP3AKB .....	8
1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.....	8
2. Program Perlindungan Perempuan .....	8
3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) .....	8
4. Program Perlindungan Khusus Anak .....	8
5. Program Pengendalian Penduduk .....	9
6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) .....	9
7. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) .....	9
8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota .....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DP3AKB .....	12
1. Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi.....	12
2. Rasio Kasus Kekerasan terhadap perempuan .....	13
3. Indeks Pembangunan Gender .....	14
4. Hasil Evaluasi Kabupaten Layak Anak.....	15
5. Rasio Kekerasan Terhadap Anak .....	16
6. Laju Pertumbuhan Penduduk.....	17
7. Cakupan Kesertaan KB Aktif .....	17
8. Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA).....	18
9. Persentase sarana dan prasarana pelayanan yang terawat dan berfungsi baik untuk mendukung pelaksanaan program.....	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DP3AKB .....	19
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	21
3.1 Tujuan dan Sasaran Kinerja Tahun 2022.....	21
3.2 Program dan Kegiatan Tahun 2022 .....	28

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka pencapaian misi ke 4 pembangunan kabupaten Lombok Timur yaitu “Memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak serta meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olahraga” yang menjadi tujuan utama program kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana telah diformulasikan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana periode 2018-2023. dokumen ini dilengkapi dengan indikator indikator, baik Indikator Sasaran Strategis (ISS), Indikator Program/Indikator Kinerja Utama/Outcome (IKU), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dan Indikator Keluaran/Output sebagai tolok ukur pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2022

Beberapa isu strategis berkembang di Lombok Timur saat ini dan perlu mendapat perhatian dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, serta kebijakan program/kegiatan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 2018-2023 diantaranya adalah: 1) Isu strategis terkait pengendalian penduduk; 2) Pemenuhan kebutuhan layanan dasar untuk pembangunan keluarga; 3) Pembangunan budaya dan karakter bangsa

### **1.2. LANDASAN HUKUM**

Dasar hukum yang mendasari penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  3. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No.2 tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
  7. Peraturan Bupati Lombok Timur No 41 Tahun 2001 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tahun 2022 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RKPD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Tujuan dari penyusunan RKT Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2022
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahun 2022
4. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022.
5. Sebagai acuan DP3AKB dalam melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tahun 2022
6. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
7. Sebagai alat kontrol organisasi dalam mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan;
8. Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan;

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan.

##### **1.1 Latar Belakang**

- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja DP3KAB Tahun 2021.

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja OPD.
- 3.2 Program dan Kegiatan

BAB IV : Penutup.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra DP3AKB

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana telah melaksanakan 8 (delapan) Program dengan 23 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

##### 1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

- A. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota`
- B. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

##### 2. Program Perlindungan Perempuan

- A. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- B. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- C. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

##### 3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

- A. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

##### 4. Program Perlindungan Khusus Anak

- A. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten Kota
- B. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- C. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



## **5. Program Pengendalian Penduduk**

- A. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas
- B. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

## **6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**

- A. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
- B. Pendayagunaan Tenaga Penvuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
- C. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelavanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
- D. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan

## **7. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**

- A. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

## **8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- D. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terhadap masing-masing program tersebut akan dianalisis berdasarkan pencapaian sasaran sebagai berikut :

<b>Sasaran 1 :</b>	Meningkatnya Upaya Pengarus Utamaan Gender			
<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Sasaran (%)</b>
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	91,6	91,33	99,71
<b>Sasaran 2 :</b>	Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan			
<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Sasaran (%)</b>
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO	%	0,004	0,013	81,25
<b>Sasaran 3 :</b>	Meningkatnya Upaya Perlindungan Terhadap Anak			
<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Sasaran (%)</b>
Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak	Poin	550	460	83,64
Rasio Kekerasan Terhadap Anak	%	0,24	0,86	27,91
<b>Sasaran 4 :</b>	Meningkatnya Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan GDPK Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan			
<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Sasaran (%)</b>
Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,63	1,76	35,80
<b>Sasaran 5 :</b>	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga			
<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Sasaran (%)</b>
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	%	51,00	50,77	99,55
Persentase sarana dan prasarana pelayanan yang terawat dan berfungsi baik untuk mendukung pelaksanaan program	%	100,00	100,00	100,00

Dalam Pelaksanaan masing-masing program input anggaran dan Realisasi adalah sebagai berikut :

NO	Uraian Program / Kegiatan	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENT ASE
	<b>PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	1.344.957.600	1.331.293.050	98,98
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota`	42.114.600	34.877.450	82,82
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.302.843.000	1.296.415.600	99,51
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>60.355.000,00</b>	<b>53.893.650,00</b>	<b>89,29</b>
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	16.182.500	13.616.000	84,14
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	44.172.500	40.277.650	91,18
	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>35.266.100</b>	<b>24.266.400</b>	<b>68,81</b>
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penvedia Lavanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	35.266.100	24.266.400	68,81
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	121.830.900	109.615.350	89,97
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	102.119.400	93.609.450	91,67
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	19.711.500	16.005.900	81,20
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>1.458.235.400,00</b>	<b>1.367.675.100,00</b>	<b>93,79</b>
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas	35.053.100	32.188.100	91,83
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.423.182.300	1.335.487.000	93,84
	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>7.098.348.650</b>	<b>6.589.214.024</b>	<b>92,83</b>
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	6.274.698.000	5.793.913.474	92,34
	Pendayagunaan Tenaga Penvuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	7.008.000	7.008.000	100,00
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	807.984.650	779.634.550	96,49

NO	Uraian Program / Kegiatan	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENT ASE
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan	8.658.000	8.658.000	100,00
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>346.287.500</b>	<b>341.648.500</b>	<b>98,66</b>
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	346.287.500	341.648.500	98,66
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>7.522.161.881</b>	<b>7.122.950.313</b>	<b>94,69</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.320.000	1.910.000	82,33
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.344.151.001	6.992.405.913	95,21
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22.748.000	20.513.000	90,17
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.136.300	33.556.300	69,71
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.519.000	26.519.000	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.486.000	9.127.112	73,10
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.801.580	38.918.988	59,15
	<b>TOTAL</b>	<b>17.987.443.031</b>	<b>16.940.556.387</b>	<b>94,18</b>

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DP3AKB

Analisis atas capaian kinerja DP3AKB Tahun 2019 adalah :

### 1. Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi

Jumlah perempuan sebagai tenaga profesional tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi pada tahun 2021 sebanyak:

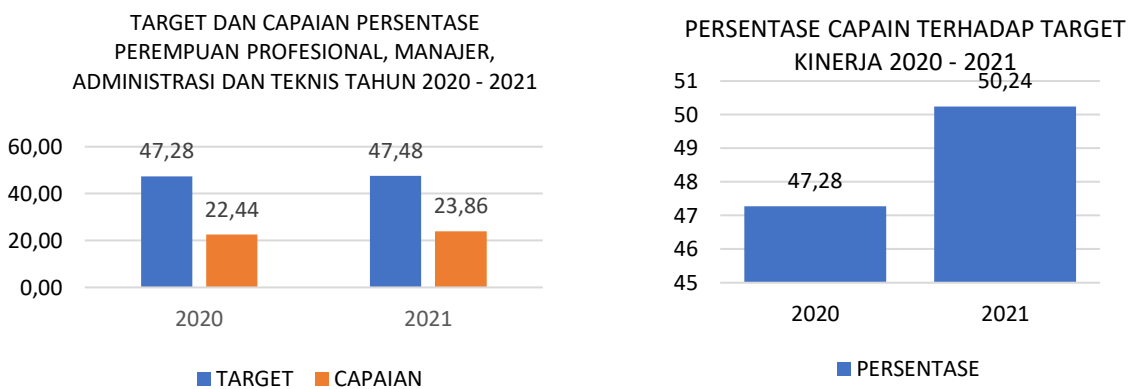
NO	KRITERIA	JUMLAH PEREMPUAN	JUMLAH POPULASI
1	Anggota DPR	5	50
2	ASN Pejabat Eselon 2	4	42
3	ASN Pejabat Eselon 3	22	222
4	ASN Pejabat Eselon 4	266	931
	Lain lain	0	0
	Total	297	1.245

Sumber : Lombok Timur Dalam Angka 2021

Berdasarkan data tersebut diatas terlihat bahwa jumlah perempuan yang menjadi pengambil keputusan sebanyak 297 orang dari total populasi pengambil keputusan sebanyak 1.245 orang sehingga Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknis adalah sebagai berikut

$$\frac{297}{1.245} \times 100 = 23,86$$

Gambaran capaian pemberdayaan Perempuan dalam berpartisipasi dibidang politik, dan pemerintahan, dengan indikator kinerja Persentase Perempuan Sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknis dapat dilihat pada grafik berikut



Secara Umum belum dapat dicapai target yang telah direncanakan, namun terjadi peningkatan persentase target capaian dari tahun sebelumnya. Angka keterwakilan perempuan di Bidang Politik, secara nasional belum bisa tercapai target sebesar 30% bahkan di Indonesia disebutkan *“Keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia tidak pernah melebihi angka 20%”*<sup>1</sup> Keterwakilan perempuan di parlemen pada pemilu 2019 berdasarkan laporan keterwakilan perempuan oleh Komisi Pemilihan Umum disampaikan bahwa secara nasional keterwakilan perempuan sebesar 16,32 % angka ini lebih besar dari keterlibatan perempuan di parlemen Lombok Timur hanya terdapat 10% persen  
 Beberapa hal yang menjadi penyebab belum optimalnya angka partisipasi perempuan adalah keterbatasan data terpilah perempuan dan laki laki di beberapa sumber data. Selain itu karena belum tersedianya data dan informasi tentang tenaga profesional disektor swasta dan non formal.

## 2. Rasio Kasus Kekerasan terhadap perempuan

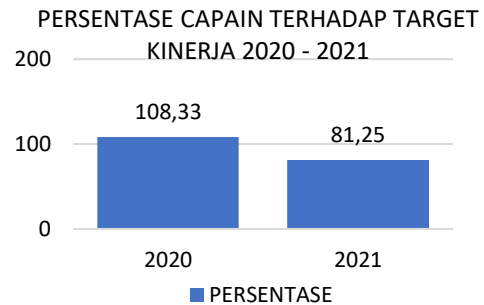
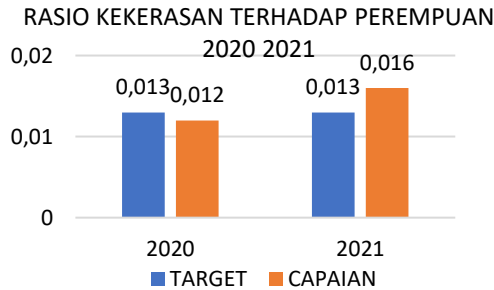
Kejadian kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu 2021 sebanyak 105 dari 565.621 jiwa penduduk perempuan di Lombok Timur. Sehingga rasio

<sup>1</sup> Widdy Yuspita Widiyaningrum (2020)

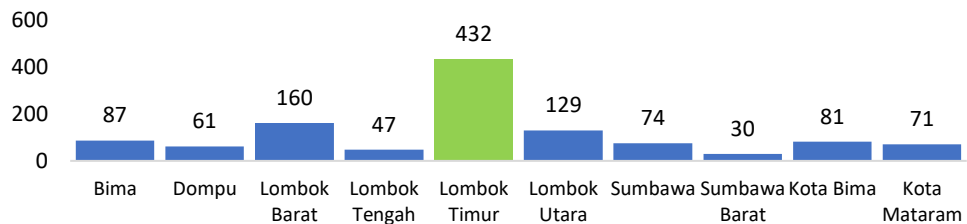
kasus KTP adalah sebesar 0,016 dari target sebesar 0,013. Hal ini menunjukkan bahwa kasus KTP tahun 2021 lebih besar dari yang ditargetkan. Rasio kekerasan terhadap perempuan adalah sebagai berikut :

$$\frac{105}{669.604} \times 1000 = 0,016$$

Capaian target terhadap kinerja pada tahun 2021 sebesar 81,25 % capaian ini menurun dari tahun 2020 capaian kinerja terhadap target sebesar 108%



Dalam program pembangunan jangka menengah upaya perlindungan perempuan terhadap kekerasan diharapkan 0,003. Sebagai gambaran bahwa kejadian kekerasan terhadap perempuan dewasa di Lombok Timur dibandingkan dengan kabupaten/kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut

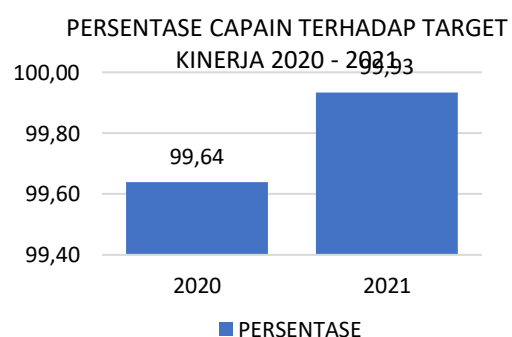
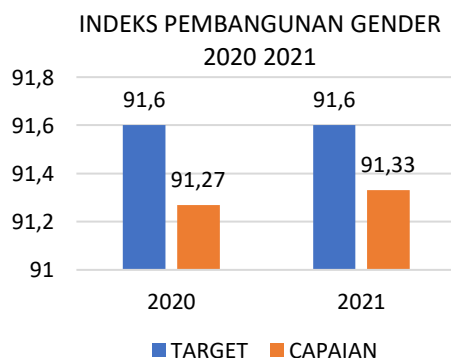


KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN 2021

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

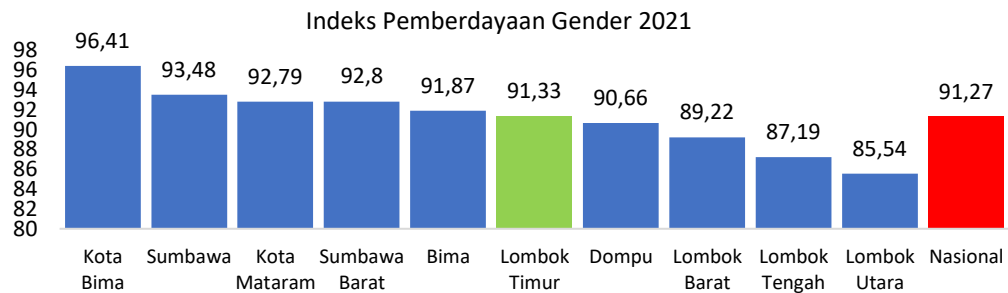
### 3. Indeks Pembangunan Gender

Pada tahun 2021 Indeks Pembangunan Gender sebesar 91,33, angka ini lebih kecil dari yang ditargetkan 91,60.



Berdasarkan data tersebut diatas dijelaskan bahwa pada tahun 2021 kesenjangan indeks pembangunan antara perempuan dan laki laki bergerak lebih dekat keangka 100 yang merupakan angka ideal kesenjangan Indeks Pembangunan antara perempuan dan laki laki atau Indeks Pembangunan Gender. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan peran perempuan dalam pembangunan pada tahun 2021. Pada akhir renstra diharapkan akan dicapai angka 91,70., yang pada kondisi saat ini masih terpaut 0,37 persen dari target akhir yang direncanakan.

Kondisi Indeks Pembangunan Gender di Lombok Timur dibandingkan dengan kabupaten/kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada table berikut



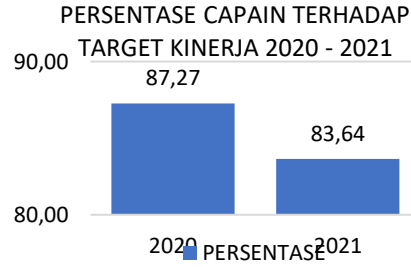
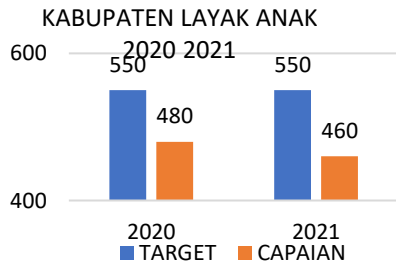
<https://www.bps.go.id/site/resultTab>

#### 4. Hasil Evaluasi Kabupaten Layak Anak

Indikator kinerja untuk menggambarkan Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Adalah angka absolut berdasarkan hasil penilaian menggunakan aplikasi online dari Kementerian PPA

Penilaian diukur melalui 24 indikator KLA, yang mencerminkan implementasi atas 5 klaster substantif Konvensi Hak Anak, yang meliputi: Klaster 1, Pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak; Klaster 2, Pemenuhan hak anak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Klaster 3, Pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan; Klaster 4, Pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan Klaster 5, Perlindungan khusus anak.

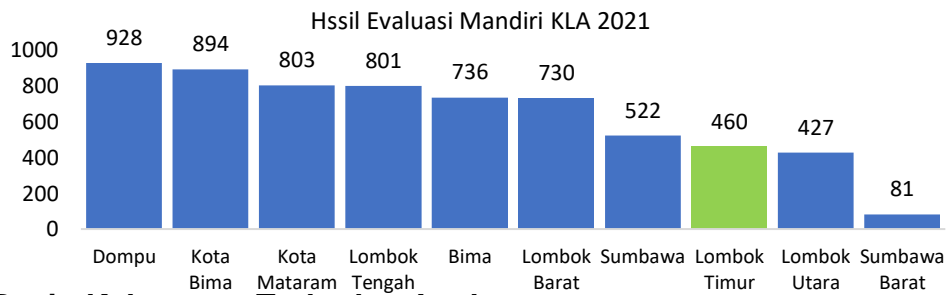
Berdasar hasil penilaian setelah dilakukan pengisian dan pengiriman data dukung hasil yang dicapai adalah



Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan melalui system yang disiapkan oleh kementerian PPA, serta melakukan pemeriksaan terhadap data dukung yang diupload saat pengisian form penilaian secara online.

Untuk mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak tingkat Pratama point yang harus dicapai adalah diatas 500 poin. Berdasarkan hasil tersebut diatas Kabupaten Lombok Timur belum mendapat predikat Kabupaten Layak Anak pada tahun 2021.

Hasil penilaian mandiri pada kabupaten/kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada table berikut :

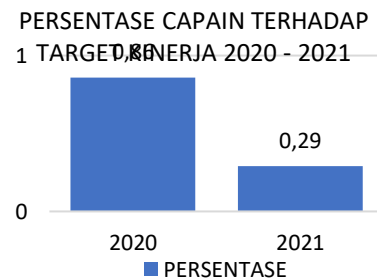
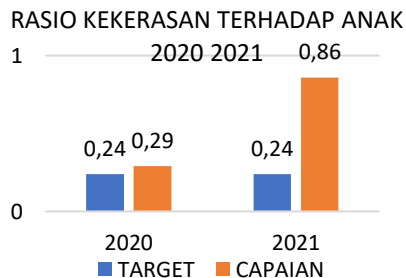


## 5. Rasio Kekerasan Terhadap Anak

Kejadian kekerasan terhadap anak dalam kurun waktu 2021 sebanyak 430 dari 502.848<sup>2</sup> jiwa penduduk usia 0-18 tahun di Lombok Timur. Sehingga rasio kasus KTA adalah sebesar 0,86 dari target sebesar 0,24. Hal ini menunjukkan bahwa kasus KTA tahun 2021 lebih besar dari yang ditargetkan. Rasio kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut :

$$\frac{430}{502.848} \times 1000 = 0,86$$

Angka kejadian KTA terhadap kejadian yang diperkirakan pada tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut :



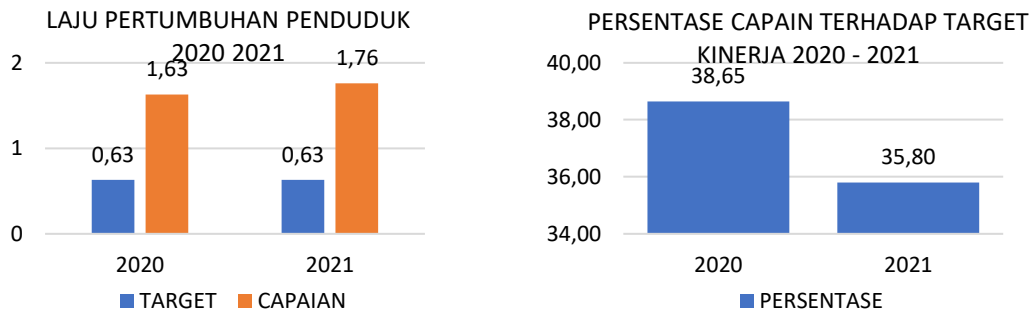
<sup>2</sup> Kabupaten Lombok Timur Dalam Anka 2022;BPS Kabupaten Lombok Timur 2022



Dari data tersebut terlihat bahwa kasus kejadian Kekerasan Terhadap Anak (KTA) yang terjadi pada tahun 2021 terjadi peningkatan dari yang diperkirakan dimana terjadi kenaikan kasus sebesar 71% persen dari yang diperkirakan. Korban kekerasan terhadap anak di Lombok Timur sebesar 0,86 lebih tinggi dari angka kejadian ditingkat Provinsi sebesar 0,38 per seribu anak.

## 6. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi NTB tahun 2020 – 2021 sebesar 1,76 %<sup>3</sup>, data tersedia adalah data tingkat provinsi. Angka tersebut lebih besar dari target 0,63 % atau realisis terhadap target sebesar 45,32 %.

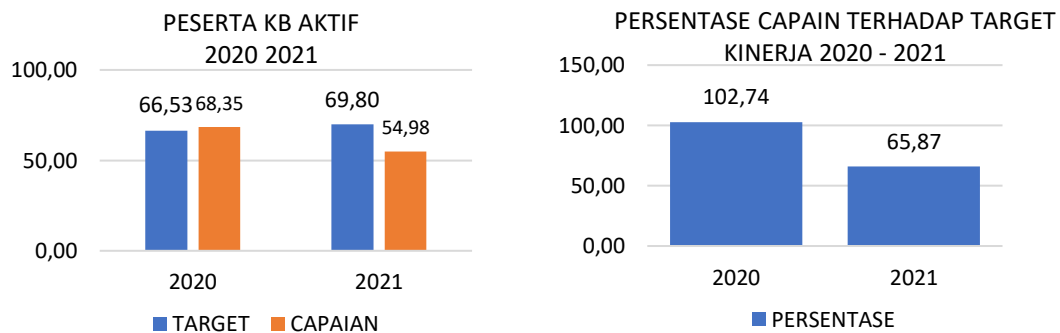


## 7. Cakupan Kesertaan KB Aktif

Dalam kurun waktu tahun 2021 dicapai prevalesi Peserta KKB Aktif Kabupaten Lombok Timur adalah 54,98 %<sup>4</sup>, dari target 69,80 %

$$\frac{137.560}{250.206} \times 100 = 54,98$$

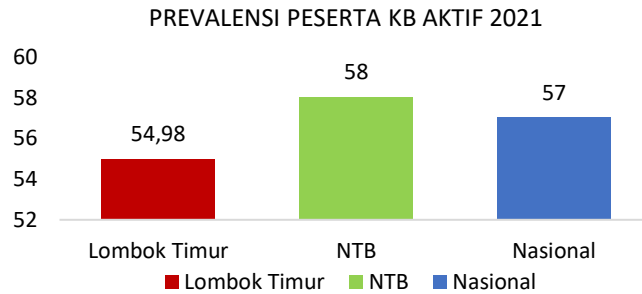
target dan capaian peserta KB aktif pada tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut



Prevalensi kesertaan ber KB dikabupaten Lombok timur bila dibandingkan dengan prevalensi Tingkat Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut

<sup>3</sup> BPS; Statistik Indonesia 2022, hal 88; BPS :Jakarta 2022

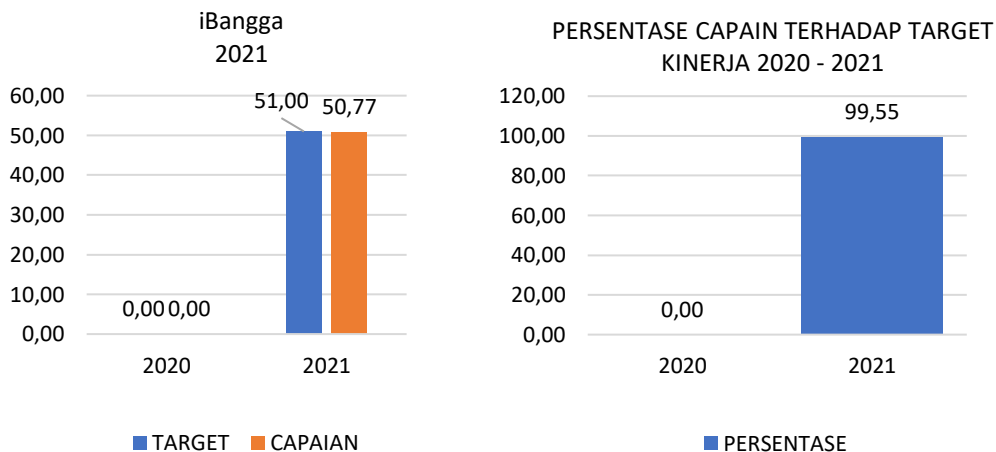
<sup>4</sup> PK21, Tabel 9



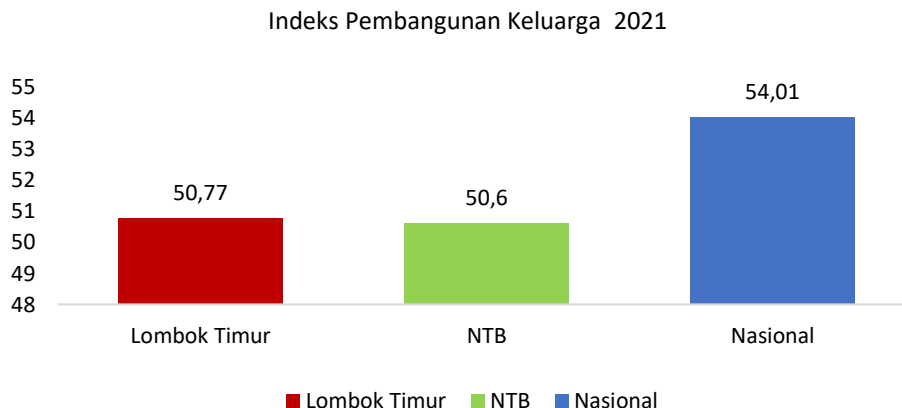
Dari data diatas terlihat bahwa capaian prevalensi peserta KB aktif pada tahun 2021 di Lombok timur masih dibawah prevalensi tingkat provinsi dan nasional

### 8. Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA)

iBangga tahun 2021 dihitung oleh BKKBN berdasarkan hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 dengan hasil 50,77 dengan target capaian 2021 sebesar 51,00.



Perhitungan indikator iBangga baru mulai dihitung pada tahun 2021 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan dengan kondisi tahun sebelumnya. Berdasarkan capain Gambaran indikator iBangga kabupaten Lombok Timur dapat dilihat pada grafik berikut :



Dari data diatas terlihat bahwa capaian Indeks Pembangunan Keluarga di Lombok Timur terpaut sedikit diatas Capaian di Tingkat Provinsi, walaupun bila dibandingkan dengan tingkat nasional, angka yang dicapai di Kabupaen Lombok Timur masih terpaut jauh.

#### **9. Persentase sarana dan prasarana pelayanan yang terawat dan berfungsi baik untuk mendukung pelaksanaan program**

Pada tahun 2021 penyedia sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program dapat disediakan 100%

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DP3AKB**

Isu-isu penting yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang adalah sebagai berikut :

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) setiap tahun meningkat namun masih relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) angkanya lebih rendah dibandingkan daerah lain atau dibawah rata-rata provinsi dan atau nasional.
3. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
4. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak seperti pekerja anak, perkawinan dibawah umur dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).
5. Belum tercapainya kategori Pratama untuk Kabupaten Layak Anak
6. Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
7. Belum tersedianya Sarana Rumah Aman Bagi Korban Kekerasan Baik Anak Maupun Perempuan.
8. Masih tingginya angka usia pernikahan muda < 19 tahun ditandai dengan data yang di rilis Kantor Departemen Agama yang secara langsung memberi dampak terhadap laju pertumbuhan penduduk serta munculnya kasus kawin

- cerai serta kasus kematian ibu dan kematian bayi.
9. Masih rendahnya Penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP) disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman PUS dan masyarakat tentang MKJP.
  10. Masih tingginya angka PUS yang tidak ber-KB (Unmetneed) disebabkan karenamasih tingginya PUS yang berstatus PUS TKI.
  11. Masih belum optimalnya upaya pelayanan dan pembinaan ketahanan keluargamelalui Kelompok Kegiatan Tribina (BKB, BKR dan BKL).
  12. Masih Tingginya angka Stunting maupun Keluarga Beresiko Stunting

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Berdasarkan Renstra DP3AKB tahun 2018 – 2023 dan analisis perkembangan dan perkembangan kondisi kebutuhan organisasi pada tahun 2022, maka ditetapkan tujuan dan sasaran kinerja tahun 2022 sebagai berikut

#### **3.1 Tujuan dan Sasaran Kinerja Tahun 2022.**

Tujuan dan sasaran kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada tahun 2022 adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan:
  - a. Meningkatnya Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG
  - b. Meningkatnya Kelembagaan PUG yang aktif
  - c. Meningkatnya perempuan di lembaga legislatif
  - d. Meningkatnya Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi
2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.:
  - a. Berkurangnya Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
  - b. Meningkatnya perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayani sesuai dengan standar.
3. Meningkatkan pemenuhan hak anak bagi anak, termasuk anak berkebutuhan khusus:
  - a. terwujudnya kabupaten/kota layak anak dengan kategori Pratama
4. Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak:
  - a. Meningkatnya anak korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar
  - b. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak
5. Meningkatkan kualitas data gender dan anak, :
  - a. Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak di semua perangkat daerah.
6. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, :

- a. Meningkatnya Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan
  - b. Penyediaan Dokumen Grand Desai Pembangunan Kependudukan Kabupaten Lombok Timur
7. Meningkatkan capaian Peserta KB aktif (CPR) Sasaran yang dicapai dari tujuan ketujuh meliputi sebagai berikut:
- a. Meningkatnya kesertaan ber KB penduduk
8. Meningkatkan upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga, Sasaran yang dicapai dari tujuan kedelapan meliputi sebagai berikut:
- a. Manurunnya angka Stunting
  - b. Meningkatnya desa/kelurahan yang memiliki Tribina Keluarga Berencana
  - c. Meningkatnya Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) aktif

Tujuan dan sasaran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tahun 2022 secara rinci sebagaimana pada table berikut

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
1	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan; Memperkuat lembaga/jejaring PUG; Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);</li> <li>2. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender</li> </ol>	Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dengan fokus pada: Penyusunan dan harmonisasi berbagai regulasi dan kebijakan PUG; penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender; penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di perangkat daerah; pendampingan implementasi PPRG.	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
			Peningkatan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya; Meningkatnya kualitas hidup perempuan melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.	Pelibatan perempuan dalam berbagai tahapan pembangunan; dan Peningkatan keberdayaan perempuan dengan fokus pada UMKM perempuan.	

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
2	Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. - Meningkatkan pemahaman dan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.	Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang	
			Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulihan dan reintegrasi sosial. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial.	Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot, penyediaan regulasi, kebijakan, petugas pelayanan dan sarana prasarana yang memadai untuk menunjang pelayanan Perlindungan perempuan.	



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
3	Meningkatkan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus	Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak	Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak. - Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak. - Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak.	Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/ Kota Layak Anak, dengan penyediaan berbagai regulasi, kebijakan, pembentukan dan pembinaan kelembagaan, dan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Kabupaten/Kota Layak Anak.	
4	Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak. Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi,	Pencegahan kekerasan terhadap anak dengan fokus pada peningkatan koordinasi dan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak	

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
			penelantaran dan perlakuan salah lainnya. Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak		
			Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif. · Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak.	Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak, mencakup regulasi, sarana dan prasarana, dan petugas pelayanan Perlindungan anak	
5	Meningkatkan kualitas data gender dan anak	Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak	Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender	Peningkatan penyusunan data gender dan anak menggunakan SIGA	
6	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Meningkatnya Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan	Peningkatan Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan melalui Advokasi & KIE	Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk yang difokuskan pada peningkatan usia	

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
				kawin pertama perempuan melalui Advokasi dan KIE	
7	Meningkatkan capaian Peserta KB aktif (CPR)	Meningkatnya kesertaan ber KB penduduk	Peningkatan kualitas pelayanan KB melalui penyediaan alat kontrasepsi, peningkatan kualitas SDM dan mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan Data Pelayanan KB dan data mikro kependudukan.	Penetapan kebijakan daerah dalam peningkatan kesertaan ber-KB difokuskan pada Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi ;peningkatan kualitas SDM ; dan mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan Data Pelayanan KB dan data mikro kependudukan.	
8	Meningkatkan upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia	Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Pengembangan model kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	

### 3.2 Program dan Kegiatan Tahun 2022

Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
  - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota`
  - b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Program Perlindungan Perempuan
  - a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
  - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
  - a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Perlindungan Khusus Anak
  - a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten Kota
  - b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Pengendalian Penduduk
  - a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas
  - b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

- a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
  - b. Pendayagunaan Tenaga Penvuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
  - c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelavanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
  - d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan
7. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022, dapat dilihat pada table berikut :

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan tahun 2022		Unit Kerja Penanggung Jawab
						Target	Rp.(000)	
Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	91,6	91,7	1.411.205	Bidang Pemberdayaan Perempuan
		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelebagaan PUG yang Aktif	%	60	60,5	56.248	Bidang Pemberdayaan Perempuan
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan dalam Jabatan Publik	%	30	30,2	1.354.957	Bidang Pemberdayaan Perempuan
	Menurunnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO	‰	0,04	0,035	98.217	Bidang Pemberdayaan Perempuan
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah jejaring dan pemerhati perempuan di Lombok Timur	%	25	27	16830	Bidang Pemberdayaan Perempuan
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Kasus Perempuan korban Kekerasan	kategori	-	baik	56.970	Bidang Pemberdayaan Perempuan
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang terstandarisasi	lembaga	0	1	24.416	Bidang Pemberdayaan Perempuan
Meningkatkan Kualitas Perlindungan Anak, Pola Asuh dan Pemenuhan Hak Anak Lainnya	Meningkatnya Upaya Perlindungan Terhadap Anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak	Kategori	-	Pratama	36.676	Bidang Perlindungan Anak
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penvedia Lavanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Jumlah Lembaga Ramah Anak	%	40	40,5	36.676	Bidang Perlindungan Anak
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	‰	0,24	0,23	137.361	Bidang Perlindungan Anak
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten Kota	Kebijakan tentang pencegahan kekerasan terhadap anak	Kebijakan	1	1	24.482	Bidang Perlindungan Anak
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kategori	Baik	Baik	92.378	Bidang Perlindungan Anak
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan yang terstandarisasi	Lembaga	0	1	20.500	Bidang Perlindungan Anak
Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk Agar Tumbuh Seimbang, Untuk Membangun Keluarga Berkualitas	Meningkatnya Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan GDPK Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,63	0,60	1.463.786	Bidang Pengendalian Penduduk
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas	Persentase Progres Kemajuan Penyusunan Dokumen Grand Desain Kependudukan (GDK) Kab. Lombok Timur	%	25	75	36.456	Bidang Pengendalian Penduduk
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Dokumen Profil Bangsa Kencana Kabupaten Lombok Timur	Dokumen	0	1	1.427.330	Bidang Pengendalian Penduduk
	Meningkatkan Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi Meoderen	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Kesertaan KB Aktif	%	69,8	69,9	8.417.321	Bidang Keluarga Berencana, Ketahan Dan Kesejahteraan Keluarga
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Keluarga Yang Terpapar Advokasi dan KIE Program Bangsa Kencana	%	67,8	70	7.560.186	Bidang Penyuluhan dan Penggerakan
		Pendayagunaan Tenaga Penvuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase IMP yang mendapatkan pembinaan program Bangsa Kencana	%	-	100	13.424	Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan tahun 2022		Unit Kerja Penanggung Jawab
						Target	Rp.(000)	
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	21,77	30	834.707	Bidang Keluarga Berencana, Ketahan Dan Kesejahteraan Keluarga
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan	Jumlah Ormas Tingkat Kabupaten yang berperan aktif dalam program Bangga Kencana	Ormas	-	3	9.004	Bidang Penyuluhan dan Penggerakan
	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	51	53	360.133	Bidang Keluarga Berencana, Ketahan Dan Kesejahteraan Keluarga
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Poktan (BKB, BKR, BKL, PIK R, UPPKS) Yang Aktif	%	50	60	360.133	Bidang Keluarga Berencana, Ketahan Dan Kesejahteraan Keluarga

